



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

I. DATA PRIBADI

- 1. Nama : FITRAJAYA SIWU
- 2. Jabatan : KEPALA KANTOR
- 3. NHK : 141823

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.542.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 246 m2/144 m2 di BANGGAI, HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/36 m2 di KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 317 m2/63 m2 di BANGGAI, HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000		
4. Tanah Seluas 1680 m2 di BANGGAI, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000		
5. Tanah Seluas 440 m2 di BANGGAI, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000		
6. Tanah Seluas 1512 m2 di BANGGAI, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000		
7. Tanah Seluas 1280 m2 di BANGGAI, HASIL SENDIRI Rp. 61.000.000		
8. Tanah Seluas 9375 m2 di BANGGAI, HASIL SENDIRI Rp. 162.500.000		
9. Tanah Seluas 365 m2 di BANGGAI, HASIL SENDIRI Rp. 72.500.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	45.000.000
1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	58.022.500
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	20.131.026



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.665.153.526

III. HUTANG

Rp. 130.187.549

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.534.965.977

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.